

Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Effect of PAD And DAU to Capital Expenditure in Hulu Sungai Selatan Regency

Zainal Ilmi*, Muhammad Saleh

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat

[*ilmizainal771@gmail.com](mailto:ilmizainal771@gmail.com)

Abstract

The purpose in this research is to know effect partially and simultaneously of PAD and DAU to BM in Hulu Sungai Selatan regency. The data research from DJPK Kemenkeu RI which the data research is LRA APBD of Hulu Sungai Selatan regency 2003-2017 and type data of research is time series data, then technical analysis used multiple linear regression analysis. The result of research showed PAD has negative and not significant effect to BM in Hulu Sungai Selatan Regency 2003-2017, DAU has positive and significant effect to BM in Hulu Sungai Selatan Regency 2003-2017, then by simultaneously or together, PAD and DAU have significant effect to capital expenditure in Hulu Sungai Selatan Regency 2003-2017.

Keywords: PAD, DAU and Capital Expenditure

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan PAD dan DAU terhadap BM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Data penelitian dari DJPK Kemenkeu RI dimana data penelitian adalah LRA APBD kabupaten Hulu Sungai Selatan 2003-2017 and jenis data peneltian adalah data runtut waktu, kemudian teknik analisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan PAD mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap BM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2003-2017, DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap BM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2003-2017, kemudian secara simultan atau bersama-sama, PAD dan DAU mempunyai pengaruh signifikan terhadap BM di kabupaten Hulu Sungai Selatan 2003-2017.

Kata Kunci: PAD, DAU dan Belanja Modal

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan salah satunya melalui pengelolaan keuangan daerah berupa APBD dengan tujuan untuk mengalokasikan pendapatan yang dipungut oleh daerah dan mendanai pengeluaran-pengeluaran belanja pemerintahan daerah dimana umumnya pengeluaran tersebut lebih banyak untuk pengeluaran belanja rutin daripada menggunakan untuk belanja modal yang umumnya pembiayaan-pembiayaan dalam belanja daerah oleh pendapatan daerah tersebut menggunakan PAD dan DAU (Adytama dan Oktaviani, 2015).

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu dari kabupaen di provinsi Kalimantan Selatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai otonomi daerah yang berlaku di Indonesia dengan bentuk pelaksanaan tersebut terdapat dalam pelaksanaan APBD dimana terlihat perkembangan PAD, DAU dan BM pada pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut.

Tabel 1
Perkembangan PAD, DAU, dan BM Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2003-2017

Tahun	PAD		DAU		BM	
	Jumlah (Juta Rupiah)	Persentase (Persen)	Jumlah (Juta Rupiah)	Persentase (Persen)	Jumlah (Juta Rupiah)	Persentase (Persen)
2003	10.150,62	-	137.660,00	-	22.753,66	-
2004	11.916,21	17,39	147.168,00	6,91	20.750,43	-8,80
2005	10.718,54	-10,05	153.812,00	4,51	27.390,31	32,00
2006	17.453,41	62,83	246.014,00	59,94	51.866,81	89,36
2007	20.452,21	17,18	269.401,91	9,51	142.346,67	174,45
2008	22.331,67	9,19	293.908,86	9,10	157.633,52	10,74
2009	28.607,09	28,10	294.246,57	0,11	124.670,20	-20,91
2010	27.931,10	-2,36	298.470,96	1,44	120.021,39	3,73
2011	41.712,78	49,34	324.267,51	8,64	114.739,20	-4,40
2012	45.107,44	8,14	404.135,72	24,63	206.281,10	79,78
2013	54.748,99	21,37	452.522,47	11,97	211.083,25	2,33
2014	85.095,56	55,43	428.093,77	-5,40	219.151,99	3,82
2015	101.673,71	19,48	482.751,54	12,77	394.567,13	80,04
2016	114.693,02	12,80	532.162,39	10,24	109.091,37	-72,35
2017	133.170,58	16,11	522.814,01	-1,76	235.160,61	115,56

Sumber : DJPK Kemenkeu RI

Berdasarkan tabel 1 diatas, terlihat bahwa PAD mengalami fluktuasi antara -10 persen sampai 62 persen selama tahun 2003 sampai tahun 2017 dimana persentase tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 62,82 persen dengan jumlah sebesar 17.435,41 juta rupiah dan persentase terendah sebesar -10,04 persen dengan jumlah sebesar 10.719,54 juta rupiah. DAU selama tahun 2003-2017 menunjukkan nilai fluktuasi antara -5 persen sampai 59 persen dimana kenaikan persentase terbesar yaitu sebesar 59,94 persen dengan jumlah sebesar 246.014,00 juta rupiah pada tahun 2004, persentase terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar -5,40 persen dengan jumlah sebesar 428.093,77 juta rupiah. BM selama tahun 2003-2017 menunjukkan fluktuasi antara -72 persen sampai 174 persen dimana kenaikan terbesar pada tahun 2007 sebesar 174 persen dengan jumlah sebesar 51.866,81 juta rupiah dan terjadi penurunan persentase sebesar 72,35 persen tahun 2016 dengan jumlah 109.091,37 juta rupiah.

Sehingga Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap BM dengan judul penelitian adalah “**Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**”.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini (1) bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara parsial terhadap belanja modal di kabupaten Hulu Sungai Selatan? (2) bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan terhadap belanja modal di kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara parsial terhadap belanja modal di kabupaten Hulu Sungai Selatan (2) untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan atau bersama-sama terhadap belanja modal di kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tinjauan Pustaka

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah berlaku sesuai undang-undangan. Sumber PAD menurut terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan pajak daerah merupakan kewajiban wajib perseorangan/badan bersifat memaksa yang diberikan kepada daerah berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang kemudian digunakan untuk kebutuhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di daerah, retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Permendagri nomor 13 Tahun 2006 mencakup bagian laba atas penyertaan modal BUMD, bagian laba atau penyertaan modal BUMN, dan bagian atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Lain-lain PAD yang Sah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan kurs, dan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana alokasi umum (DAU) adalah suatu jenis transfer dana perimbangan yang bersumber dari APBD yang dialokasikan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, kemudian kebijakan-kebijakan dana alokasi umum yaitu secara keseluruhan sekurang-kurangnya 26 persen dari PDN Neto APBN, dialokasikan berdasarkan celah fiskal (kebutuhan fiskal dikurang kapasitas fiskal) dan alokasi dasar (jumlah gaji PNS daerah), kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan pendanaan bagi Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur dengan melihat variabel-variabel utama yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, IKK, PDRB per Kapita dan IPM, sedangkan kapasitas fiskal adalah sumber pendanaan daerah dari PAD dan DBH, kemudian juga proporsi atau pembagian DAU ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Belanja Modal (BM)

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan belanja modal (BM) adalah pengeluaran belanja daerah yang dilakukan pembelian atau pengadaan atau juga pembangunan aset-aset tetap daerah yang berwujud dengan nilai manfaatnya lebih dari satu tahun (12 bulan) yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan, seperti bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Menurut Syaiful (2006) dalam Ningsasra (2016), belanja modal dapat dikategorikan menjadi 5 kategori belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya.

Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Daerah dengan sarana dan prasarana yang memadai dan layak maka akan memberikan pengaruh pada produktifitas masyarakat daerah tersebut sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya pada daerah tersebut sehingga PAD yang meningkat yang diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap belanja pemerintah daerah yang utamanya digunakan untuk penganggaran ke dalam belanja modal agar pelayanan publik dapat diberikan secara baik serta kesejahteraan masyarakat meningkat dengan menyediakan sarana dan prasarana memadai yang bersumber dari PAD tersebut karena masyarakat di daerah telah memberikan sedikit atau sebagianya uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi dan lainnya (Ningsasra, 2016).

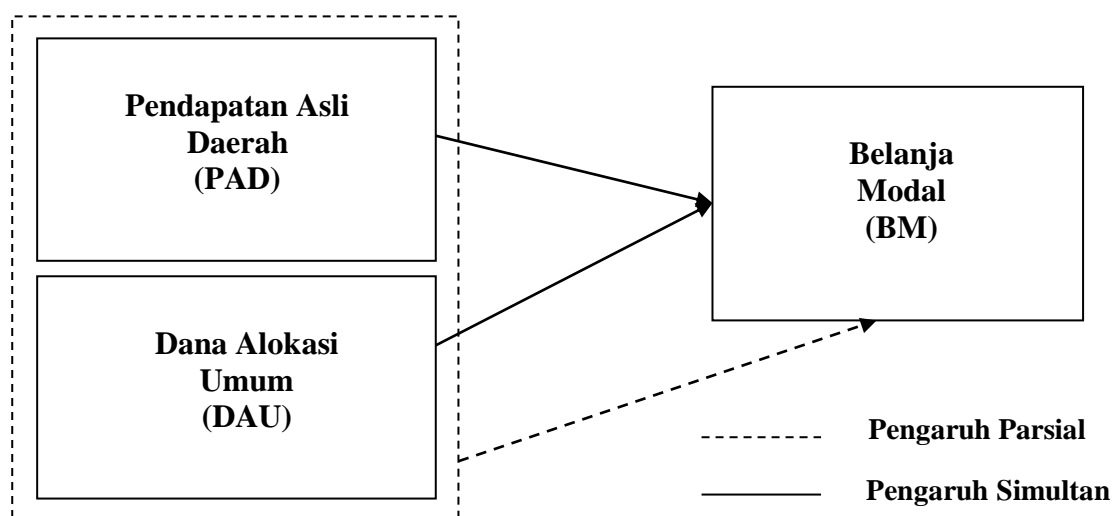
DAU diberikan oleh pemerintah pusat yang masuk ke anggaran daerah untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat yang dianggarkan melalui alokasi Belanja Modal, kemudian DAU juga merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah untuk menunjukkan kemandirian keuangan suatu daerah karena semakin banyak DAU yang diterima maka kondisi keuangan daerah tersebut semakin tergantung terutama untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri sehingga daerah tersebut dapat dikatakan belum mandiri secara keuangan dan sebaliknya sehingga DAU akan memberikan pengaruh terhadap belanja modal (Ningsasra, 2016).

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya pada penelitian di Propinsi Sulawesi Utara Periode 2009-2016 oleh Kakasih, Kawung, dan Tumangkeng (2018) menunjukkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap BM, DAU berpengaruh signifikan terhadap BM, PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap BM, penelitian selanjutnya di Kabupaten dan Kota di Propinsi Riau oleh Suryani dan Pariani (2018) menunjukkan PAD berpengaruh signifikan terhadap BM dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap BM, dan penelitian yang dilakukan oleh Ningsasra (2016) menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap BM dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap BM tersebut.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka berupa teori-teori pendukung dan penelitian-penelitian terdahulu, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1
Skema Kerangka Konseptual

Skema kerangka konseptual berfikir diatas menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) akan memberikan pengaruh terhadap belanja modal (BM) secara parsial atau masing-masing karena kedua variabel tersebut merupakan sumber utama untuk mendanai belanja daerah berupa belanja modal, kemudian secara simultan atau bersama-sama variabel-variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DA) akan memberikan pengaruh terhadap belanja modal (BM) sehingga model ini layak digunakan dalam penelitian ini.

Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah (1) pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (BM) dan (2) pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (BM)

Metode

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam ini adalah menganalisis pengaruh PAD dan DAU dalam mempengaruhi BM yang terdapat pada kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2003-2017.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dan tipe penelitian adalah asosiatif.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan data yang digunakan adalah data *time series* (runtut waktu), sedangkan sumber data berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan hasil pendapatan daerah dari sumber ekonomi asli daerah ber pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD dinyatakan dalam satuan juta rupiah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah jenis transfer dana perimbangan yang dirumuskan dengan alokasi dasar berupa gaji pegawai negeri sipil daerah dan celah fiskal berupa kebutuhann fiskal daerah yang dikurangi kapasitas fiskal daerah. DAU dinyatakan dalam juta rupiah.

Belanja Modal (BM)

BM merupakan belanja untuk menambah, merawat, dan memperbaiki aset tetap daerah, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang nilai periode akuntansinya lebih dari 12 bulan serta siap untuk digunakan. BM dinyatakan dalam satuan juta rupiah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Data dalam penelitian ini dikumpulkan atau didokumentasikan dengan cara yaitu *browsing* situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah teknik analisis data dengan menggunakan model regresi linier dengan jumlah variabel bebas lebih dari satu variabel bebas (Amir, Junaidi, dan Yulmardi, 2009:236). Model persamaan analisis regresi linier berganda yang terdapat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$BM = \beta_0 + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \varepsilon$$

Keterangan

BM = Belanja Modal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien PAD

β_2 = Koefiisien DAU

ε = *error*

Uji Hipotesis

Uji t

Uji t adalah pengujian pada masing-masing variabel dalam model dengan kaidah menggunakan nilai t hitung dan t tabel dimana jika t hitung > t tabel maka tolak H_0 dan jika t hitung < t tabel maka terima H_0 (Amir, Junaidi, Yulmardi, 2009:110). Uji t juga dapat dilihat

dengan prob. t-hitung dimana prob. t hitung $> 0,05$ maka H_0 diterima dan jika t hitung $< 0,05$ ditolak.

Uji F

Uji F adalah pengujian secara simultan atau bersama-sama pada variabel dalam model dengan kaidah menggunakan F-hitung dan F-tabel dimana jika F-hitung $> F$ -tabel maka H_0 diterima, namun jika F-hitung $< F$ -tabel maka H_0 ditolak (Amir, Junaidi, dan Yulmardi, 2009:110). Uji F juga dapat dilihat dengan probabilitas F hitung dimana jika $> 0,05$ maka H_0 diterima namun jika $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Uji R^2 (keofisien determinasi) adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan besarnya tingkat variasi dari variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas dimana untuk variabel bebas lebih dari dua menggunakan *adjusted* R^2 (Amir, Junaidi, dan Yulmardi, 2009:110).

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
(Dalam Juta Rupiah)

Statistik Deskriptif	PAD	DAU	BM
Rata-rata	48.384,26	332.495,30	143.833,80
Nilai Maksimum	133.170,60	532.162,40	349.567,10
Nilai Minimum	10.150,62	137.660,00	20.750,34
Standar Deviasi	40.799,42	132.884,20	100.110,70

Sumber : *Eviews 10 (data diolah)*

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa nilai statistik deskriptif variabel penelitian diukur dengan menggunakan ukuran rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Secara rata-rata PAD sebesar 48.384,26 juta rupiah, nilai maksimum PAD sebesar 133.170,60 juta rupiah pada tahun 2017, nilai minimum PAD sebesar 10.150,62 juta rupiah pada tahun 2003, standar deviasi PAD sebesar 40.799,42 juta rupiah. Secara rata-rata DAU sebesar 332.495,30 juta rupiah, nilai maksimum DAU sebesar 532.162,39 juta rupiah pada tahun 2017, nilai minimum DAU sebesar 137.600,00 juta rupiah pada tahun 2003, dan standar deviasi DAU sebesar 132.884,20 juta rupiah. Secara rata-rata, BM sebesar 143.833,80 juta rupiah, nilai maksimum BM sebesar 394.750,34 juta rupiah, nilai minimum BM sebesar 20.750,34 juta rupiah, dan standar deviasi BM sebesar 100.110,70 juta rupiah.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Bebas : Log(BM)			
Variabel Terikat	Koefisien	T-hitung	Probabilitas
Log(PAD)	0,578045	-1,456348	0,1710
Log(DAU)	2,875545	3,769532	0,0027
Konstanta	-8,120485	-3,222229	0,0073
Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R-Squared</i>)			0,822691
F-hitung			33,47911
Probabilitas F-hitung			0,000012

Sumber : *Eviews 10 (data diolah)*

Berdasarkan tabel 2 diatas, maka secara matematis persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut.

$$\text{Log(BM)} = -8,120485 - 0,578046 * \text{Log(PAD)} + 2,875545 * \text{Log(DAU)}$$

Berdasarkan hasil persamaan tersebut maka dapat diinterpretasikan model tersebut sebagai berikut : (1) Log(PAD) mempunyai nilai koefisien sebesar -0,578, hal ini menunjukkan bahwa jika PAD naik 1 persen maka BM turun sebesar -0,578 persen, sebaliknya jika PAD turun 1 persen maka BM naik sebesar -0,578 persen, (2) jika Log(DAU) mempunyai nilai koefisien sebesar 2,875 persen, hal ini menunjukkan bahwa jika DAU naik 1 persen maka BM naik sebesar 2,875 persen, sebaliknya jika DAU turun sebesar 1 persen maka BM turun sebesar 2,875 persen, (3) jika PAD dan DAU tidak mengalami kenaikan dan penurunan atau bernilai nol maka BM sebesar -8,120485 juta rupiah.

Pengujian Hipotesis

Uji F

Uji F dengan hasil perhitungan F-tabel dan hasil F-hitung menunjukkan nilai sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{F-tabel} &= a ; (k-1), (n-k) \\ &= 0,05 ; (3-1), (15-3) \\ &= 0,05 ; (2) \\ &= 3,81 \end{aligned}$$

Keterangan :

- a = 0,05
- n = banyak tahun (15 tahun)
- k = jumlah variabel yang digunakan (3)

Berdasarkan hasil nilai dari F-hitung pada tabel 2 dan F-tabel yang telah diketahui hasilnya, maka nilai F-hitung > F-tabel yaitu 33,47911 > 3,81 dan nilai probabilitas F-statistik

sebesar 0,000012. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap BM.

Uji t

Uji t dengan hasil perhitungan t-tabel dan hasil t-hitung menunjukkan nilai sebagai berikut :

$$\begin{aligned}t\text{-tabel} &= \frac{\alpha}{z}; (n - k) \\ &= 0,025 ; (15-3) \\ &= 0,025 ; 12 \\ &= 2,179\end{aligned}$$

Keterangan :

a = 0,05

n = banyaknya tahun (15 tahun)

k = jumlah variabel yang digunakan (3)

Berdasarkan hasil nilai probabilitas signifikansi dan t-hitung pada tabel 2 dan nilai t-tabel yang telah diketahui, maka disimpulkan bahwa, (1) PAD dengan nilai signifikansi sebesar 0,1710 lebih besar dari 0,05 dan t-hitung > t-tabel yaitu $1,456 > 2,179$ sehingga disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap BM, (2) DAU dengan nilai signifikansi sebesar 0,0027 lebih kecil dari 0,05 dan t-hitung > t-tabel yaitu $3,769 > 2,179$ sehingga disimpulkan DAU berpengaruh signifikan terhadap BM.

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 2 menunjukkan bahwa R² sebesar 0,823 persen. Ini berarti bahwa model tersebut dapat dikatakan baik, dimana sebesar 82,3 persen variabel bebas berupa PAD dan DAU dapat menjelaskan variasi perubahan variabel terikat berupa BM dan sisanya 17,7 persen merupakan variabel lainnya yang berada diluar model ini.

Pembahasan

Pengaruh PAD dan DAU Terhadap BM

PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap BM sehingga model yang terdapat dalam penelitian ini telah bersifat *fit* artinya bahwa model penelitian ini layak untuk digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan penelitian yang dilakukang oleh dari Kakasih, Kawung, dan Tumangkeng (2018), Suryani dan Pariani (2018), dan Ningsasra (2016).

Pengaruh PAD Terhadap BM

PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap BM, hal ini disebabkan oleh tidak sepenuhnya belanja modal dapat dibiayai oleh PAD mengingat masih rendahnya kontribusi pendapatan tersebut terhadap penerimaan daerah sehingga kontribusinya terhadap belanja modal pun juga masih kecil kemudian ketika PAD naik maka sumber pendapatan daerah yang besar (DAU) turun maka jumlah belanja modal pun akan turun karena belanja modal banyak dibiayai oleh sumber tersebut yang lebih besar daripada PAD, sebaliknya juga jika PAD turun maka sumber penerimaan lainnya yang bernilai besar akan meningkatkan belanja modal meningkat karena nilainya yang besar tersebut untuk mencukupi pembiayaan belanja modal walaupun belanja modal juga dibiayai menggunakan PAD. Pada pengujian hipotesis ini sesuai dengan penelitian Kakasih, Kawung, dan Tumangkeng (2018) namun tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Pariani (2018) dan Ningsasra (2016).

Pengaruh DAU Terhadap BM

DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM karena banyak dibiayai oleh transfer tersebut dimana dana tersebut merupakan salah satu jenis transfer dana perimbangan yang sangat besar nilainya untuk mencukupi kebutuhan belanja modal pemerintah daerah sehingga ketika meningkat kecenderungan akan meningkatkan jenis belanja tersebut menjadi lebih besar dan sebaliknya ketika menurun kecenderungan akan menurunkan belanja modal menjadi lebih kecil. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai penelitian dari Kakasih, Kawung, dan Tumangkeng (2018), Suryani dan Pariani (2018), dan Ningsasra (2016).

Penutup

Implikasi Penelitian

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan pengujian hipotesis pertama, variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap BM dan arah pengaruhnya bernilai negatif atau berlawanan arah sehingga hal ini menunjukkan terjadinya implikasi belanja modal pemerintah daerah masih belum dapat mensejahterakan masyarakat karena PAD sebagai sumber ukuran kemandirian keuangan daerah guna mencapai kesejahteraan tidak dapat berjalan dengan baik karena pengaruhnya yang tidak signifikan dan bernilai negatif terhadap BM bagi pemerintah daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga perlu perbaikan dan peningkatan kemandirian keuangan daerahnya dengan berbagai program dan perencanaan keuangan agar dapat meningkatkan belanja modal menjadi lebih besar dari pembiayaan menggunakan PAD.

Pengujian hipotesis kedua, DAU berpengaruh signifikan dan positif terhadap BM menunjukkan bahwa terjadi implikasi bahwa belanja pemerintah daerah terutama belanja modal masih didominasi oleh DAU dalam pembiayaannya sehingga hal tersebut tidak menunjukkan kemandirian keuangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pada dasarnya dana alokasi umum hanyalah transfer untuk membantu kegiatan dan aktivitas pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat tanpa adanya pembiayaannya sehingga hal tersebut tidak menunjukkan kemandirian keuangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pada dasarnya dana alokasi umum hanyalah transfer untuk membantu kegiatan dan aktivitas pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat tanpa adanya kontribusi nyata untuk memperbaiki perekonomian daerah karena sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan daerah adalah pendapatan asli daerah, sehingga pemerintah daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan seharusnya menggunakan dana alokasi umum dengan bijak sesuai kebijakan penganggaran yang lebih transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terdapat didalam penelitian ini adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas yaitu hanya terdapat dua variabel bebas yang mempengaruhi belanja modal yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sehingga masih terdapat variabel lainnya yang dapat mempengaruhi belanja modal pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan seperti dana bagi hasil, dana alokasi khusus pendapatan hibah, dan sebagainya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan bahwa yaitu : (1) PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap BM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003-2017, (2) DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003-2017, dan (3) PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap BM.

Saran

Saran-saran yang terdapat dalam penelitian ini yaitu : (1) untuk pemerintah daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan agar dapat senantiasa terus menggali sumber-sumber penerimaan asli daerah terutama yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) menjadi lebih meningkat setiap tahunnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah sebagai komponen utama PAD kemudian mengelola dan memanfaatkan dana transfer perimbangan terutama Dana Alokasi Umum (DAU) untuk meningkatkan mutu dari pelayanan

publik di daerah secara lebih bijak dan lebih baik, (2) kepada penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah cakupan wilayah ruang lingkup menjadi lebih luas lagi terutama dari lingkup kabupaten atau kota khususnya yang berada di provinsi Kalimantan Selatan supaya hasil penelitian yang dilakukan lebih mendalam (3) juga menambah tahun penelitian agar lebih akurat informasi yang diperoleh, dan (4) menambahkan variabel-variabel bebas lainnya yang dapat berpengaruh terhadap belanja modal seperti dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana hibah dan sebagainya.

Daftar Referensi

- Adytama, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 4(2), 190-205.
- Amir, A., Junaidi, & Yulmardi. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Bogor: IPS Press.
- BPS. (2018). *Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2018*. Kandungan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Kakasih, Rendy Armando; Kawung, George M.V.; Tumangkeng, Steeva Y.L. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sulawesi Utara Periode 2009-2016. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(2), 124-134.
- Mendagri. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Ningsasra, Y. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 1-21.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suryani, Febdwi; Pariani, Eka. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 6(1), 11-22.